



Jurnal Ilmu Dakwah

[Journal homepage](#)



Dakwah Transformatif Kiai: Studi terhadap Gerakan Transformasi Sosial KH. Abdurrahman Wahid

Ahmad Shofi Muhyiddin

IAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

Email: ashofi@iainkudus.ac.id

Abstract

This article is about the propagation of social transformation KH. Abdurrahman Wahid in Indonesia. This article at least proves that the change in the strategy, method and orientation of the indictment contributed significantly to social transformation among the people. The main source of this research is data in the form of methods, strategies and orientation of da'wah and social actions carried out by KH. Abdurrahman Wahid as a religious functionary, as a political figure and a cultural figure. To understand the methods, strategies, orientation and social actions of KH. Abdurrahman Wahid in the effort of social transformation was explored through qualitative methods by reading his works, intellectual works related to him, observing while he was still alive and interviewing, then enriched with the methodology and discipline of the sociology of communication communication and socio-anthropology of religion. The findings of this article indicate that socio-cultural transformation in Indonesia is due to changes in material, methods, strategies and orientation of the mission of KH. Abdurrahman Wahid as a religious functionary, catalyst, source liaison, problem-solving provider and mediator. Thus, this article proves that Kiai, especially KH. Abdurrahman Wahid, not only served as a messenger of religion, cultural brokers and mediators, but more than that, as a provider of problem solving, process triggers, and community advocates, even as "gods" of the oppressed minorities.

Keyword: Transformative Da'wah, Social Transformation, Abdurrahman Wahid

Abstrak

Artikel ini mengangkat tentang dakwah transformasi sosial KH. Abdurrahman Wahid di Indonesia. Artikel ini setidaknya membuktikan bahwa perubahan strategi, metode dan orientasi dakwa berkontribusi signifikan terhadap transformasi sosial di kalangan masyarakat. Sumber utama penelitian ini adalah data berupa metode, strategi dan orientasi dakwah dan tindakan sosial yang dilakukan oleh KH. Abdurrahman Wahid sebagai fungsionaris agama, sebagai tokoh politik dan tokoh budaya. Untuk memahami metode, strategi, orientasi dan tindakan sosial KH. Abdurrahman Wahid dalam upaya transformasi sosial digali melalui metode kualitatif dengan cara pembacaan terhadap karya-karyanya, karya cendekiawan terkait dengannya, pengamatan semasa ia masih hidup dan wawancara, kemudian diperkaya dengan metodologi dan disiplin ilmu sosiologi komunikasi dan sosio-antropologi agama. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa transformasi sosial-budaya di Indonesia di antaranya terjadi karena adanya perubahan materi, metode, strategi dan orientasi dakwah KH. Abdurrahman Wahid sebagai fungsionaris agama, katalisator, penghubung sumber, pemberi pemecahan masalah dan mediator. Dengan demikian, artikel ini membuktikan bahwa Kiai, khususnya KH. Abdurrahman Wahid, bukan saja berperan sebagai penyampai pesan agama, makelar budaya dan mediator, tapi lebih dari itu, sebagai pemberi pemecahan masalah, pemicu proses, dan pendamping masyarakat, bahkan sebagai “tuhan” kaum minoritas yang tertindas.

Kata Kunci: Dakwah Transformatif, Transformasi Sosial, Abdurrahman Wahid

1. Pendahuluan

Dalam konteks sejarah, pelaksanaan dakwah yang dilakukan oleh Kiai¹ di Nusantara sebelumnya menunjukkan bagaimana tingkat jarak kesenjangan sosial di antara pembawa pesan (da'i) dan masyarakat yang menerima pesan-pesan Islam (mad'u). Hal ini dikarenakan pelaksanaannya masih merupakan usaha-usaha mengintroduksi dengan mengacu pada cara yang lama, dengan tanpa berorientasi pada nilai-nilai dan tatanan kontekstual sehingga pesan yang diterima tersebut tidak akan pernah mengakar dalam masyarakat. Dakwah seharusnya dipahami sebagai suatu upaya transformasi sosial terencana dan terprogram, bukan seperti mengisi suatu gelas kosong dengan air, sehingga perlu ada paradigma baru dalam melihat perkembangan dakwah ke depan, seperti pendekatan transformasi sosial, di samping pendekatan-pendekatan yang lain².

Dakwah semestinya dipahami sebagai suatu aktivitas yang melibatkan proses transformasi yang memang tidak terjadi begitu saja, tapi membutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk merubah situasi dan kondisi mereka melalui pendidikan dan komunikasi yang berkelanjutan. Hal ini berarti sangat terkait dengan upaya rekayasa sosial³. Sasaran utama dakwah adalah terciptanya suatu tatanan sosial yang di dalamnya hidup sekelompok manusia dengan penuh kedamaian, keadilan,

¹ Istilah “kiai”, pada masyarakat Jawa, merupakan salah seorang figur elite, fungsionaris agama Islam yang mempunyai kedudukan terhormat dan menjadi panutan masyarakat. Dengan kualifikasi sebagai kelompok yang memiliki ilmu pengetahuan agama Islam, mereka diakui sebagai penyebar dan pemelihara ajaran Islam, khususnya dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Pada umumnya gelar itu diberikan oleh masyarakat kepada mereka yang memiliki tempat untuk memberikan pengajaran agama Islam (pesantren), atau kepada putra dan penerus dari perjuangannya.

² Eisenstadt, 1986, *"Revolusi dan Transformasi Masyarakat"*, terj. Chnadra Johan, (Jakarta: Rajawali), h. 143

³ Alman, P. 2001, *"Revolutionary Social Transformation: Democratic Hopes, Political Possibilities and Critical Education"*, (London: Bergin & Garvey), h. 1

keharmonisan di antara keragaman yang ada, yang mencerminkan sisi Islam sebagai *rahmatan li al-'alamīn*⁴.

Masyarakat kini tengah mengalami apa yang disebut transformasi sosial sebagai dampak dari arus modernisasi. Transformasi ini mendesak setiap anggota masyarakat untuk menguji kembali validitas beragam konvensi yang dilahirkan oleh lembaga-lembaga sosial dan kebudayaan dalam rangka *survive* dan *revive*. Transformasi ini juga memaksa setiap pemeluk agama untuk melakukan reorientasi terhadap pola penghayatan keagamaannya dengan menafsirkan dan memaknai ulang format pemahamannya terhadap validitas tekstual kitab suci⁵.

Transformasi sosial dalam perkembangan kehidupan masyarakat seringkali dianalogikan seperti halnya proses evolusi, suatu proses perubahan yang berlangsung sangat lambat. Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh hasil-hasil penemuan ilmu biologi, yang memang telah berkembang dengan pesatnya. Peletak dasar pemikiran perubahan sosial sebagai suatu bentuk "evolusi" antara lain adalah Herbert Spencer (1820-1903)⁶ dan Auguste Comte (1798-1857)⁷. Keduanya memiliki pandangan tentang perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat dalam bentuk perkembangan yang linear menuju ke arah yang positif. Perubahan sosial menurut pandangan mereka berjalan lambat namun menuju suatu bentuk "kesempurnaan" masyarakat⁸.

Selain itu, transformasi sosial pada hakikatnya adalah transformasi kesadaran. Bagi Marx, masyarakat akan mengalami transformasi jika timbul kesadaran untuk mencerahkan dan membebaskan diri (kemanusiaan) dari dominasi, baik dominasi feodal maupun dominasi borjuis, yakni dengan menciptakan masyarakat yang ideal masyarakat tanpa kelas atau sosialis. Menurutnya, kesadaran untuk berjuang ini muncul karena tekanan-tekanan material dan produksi. Dengan kata lain, kesadaran untuk berjuang akan menggerakkan masyarakat dan strukturnya. Gerakan inilah yang menandai transformasi⁹.

Sebaliknya Durkheim, sebagai tokoh strukturalis fungsional, melihat perubahan sosial sebagai gejala wajar yang evolutif. Dalam teori sosial Durkheim, salah satu masalah yang menjadi fokus adalah tentang solidaritas sosial. Di dalam solidaritas sosial terdapat kesadaran kolektif. Solidaritas sosial dan kesadaran kolektif ini ada pada masyarakat tradisional dan modern. Hanya saja kesadaran kolektif yang ada pada masyarakat tradisional terbentuk berdasarkan persamaan-persamaan dari

⁴ Aziz, Moh. Ali., Rr. Suhartini, dan A. Halim (ed), 2005, *"Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi"*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren), h. 26

⁵ McGuire, Meredith B., 2002, *"Religion The Social Context"*, (USA: Wodsworth Thomson Learning), h. 244

⁶ Herbert Spencer memperkenalkan pendekatan analogi organik, yang memahami masyarakat seperti tubuh manusia, sebagai suatu organisasi yang terdiri atas bagian-bagian yang tergantung satu sama lain. Lihat: Korotayev, Andrey., Artemy Malkov, and Daria Khaltourina, 2006, *"Introduction to Social Macrodynamics"*, (Moscow: URSS), h. 25

⁷ Comte menyebutkan ada tiga tahap perkembangan intelektual, yang masing-masing merupakan perkembangan dari tahap sebelumnya. Tiga tahapan itu adalah: Tahap teologis: adalah tingkat pemikiran manusia bahwa semua benda di dunia mempunyai jiwa dan itu disebabkan oleh suatu

kekuatan yang berada di atas manusia. Tahap metafisis: pada tahap ini manusia menganggap bahwa di dalam setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya akan dapat diungkapkan. Oleh karena adanya kepercayaan bahwa setiap cita-cita terkait pada suatu realitas tertentu dan tidak ada usaha untuk menemukan hukum-hukum alam yang seragam. Tahap positif: adalah tahap di mana manusia mulai berpikir secara ilmiah. Comte kemudian membedakan antara sosiologi statis dan sosiologi dinamis. Sosiologi statis memusatkan perhatian pada hukum-hukum statis yang menjadi dasar adanya masyarakat. Sosiologi dinamis memusatkan perhatian tentang perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan. Lihat: Ritzer, Goerge., Douglas J. Goodman, 2007, *"Teori Sosiologi Modern"*, terj. Alimandan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 19

⁸ Tema perubahan sosial untuk kemanusiaan ataupun topik kemanusiaan sebagai basis perubahan sosial selalu menarik untuk ditelaah. Sebab, di dalamnya memuat semangat refleksi kritis seorang aktor yang bergabung dalam komunitas tertentu maupun tanggung jawab aktor untuk senantiasa bergerak dan melakukan pemihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Lihat: Khidir, Piet H. 2006, *"Nalar Kemanusiaan Nalar Perubahan Sosial"*, (Jakarta: Teraju), h. xvii

⁹ Kuntowijoyo, 1991, *"Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi"*, (Bandung: Mizan), h. 295

individu. Sementara itu, pada masyarakat modern kesadaran kolektif itu muncul melalui konsensus dari berbagai perbedaan-perbedaan¹⁰. Jika kesadaran akan persamaan-persamaan dalam masyarakat tradisional (yang bercorak mekanistik) pecah atau memudar, maka terjadilah perubahan sosial. Ada dua point penting dalam transformasi sosial Durkheim. *Pertama*, transformasi kesadaran kolektif yang bercorak mekanistik menuju organistik. *Kedua*, transformasi kesadaran akan adanya ikatan, yang secara bersamaan akan melahirkan hukum dan peraturan-peraturan. Kesemuanya (*social order*) ini untuk mempertahankan ikatan dan solidaritas¹¹.

Lain hanya dengan Weber, transformasi sosial dapat bermula dari usaha pencapaian "tipe ideal". Penciptaan tipe ideal ini dapat digerakkan oleh dominasi dan otoritas, baik otoritas tradisional, legal (rasional), maupun kharismatik. Ketiga otoritas tersebut pada akhirnya mengontrol seluruh kekuatan, bahkan memunculkan birokrasi. Ketiga otoritas ini adalah sumber penting bagi munculnya cita-cita dan nilai. Hukum-hukum baru dimunculkan secara sadar oleh pemegang otoritas. Dengan demikian, hukum, peraturan-peraturan dan tatanan sosial lainnya secara sadar dibuat sebagai legitimasi yang bersifat simbolik. Pada akhirnya hukum dan aturan inilah yang akan membentuk struktur sosial, stratifikasi, akumulasi, kehormatan dan kekayaan. Contoh nyata dari transformasi sosial Weber adalah analisisnya terhadap peran negara sebagai birokrasi yang memunculkan kapitalisme¹².

Menurut Weber, hampir semua pendiri agama mempunyai otoritas kharismatik. Dengan otoritas ini pemimpin kharismatik dapat mengeluarkan dan memunculkan hukum-hukum baru berdasarkan otoritasnya. Peran tokoh kharismatik ini mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam perkembangan dan perubahan masyarakat. Agar dapat memiliki pengaruh pada masyarakat, maka upaya yang dilakukan oleh pemimpin agama tersebut adalah menyaturagakan cita-cita, ide, dalam sebuah bentuk tatanan yang lebih mapan melalui proses rutinisasi. Teori transformasi Weber ini, secara implisit dapat diperoleh dalam penjelasannya mengenai transisi menuju kapitalisme¹³.

Pandangan sosiolog muslim terkemuka Ibn Khaldūn, berusaha menggali berbagai faktor yang terlibat dalam perubahan sosial. Kerangka transformasi Ibn Khaldūn sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan filosofisnya "*al-Insān madaniyyūna bi al-ṭabī'i*". Sifat sosial ini diturunkan dari fakta bahwa masing-masing orang membutuhkan orang lain untuk membantu beberapa aktivitas supaya bisa eksis. Tak seorang pun yang bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Karena kebutuhan manusia itu hanya bisa dipenuhi dengan berbagai usaha yang membentuk kerjasama dari orang banyak¹⁴.

Pandangan-pandangan transformasi Ibn Khaldūn yang terpenting adalah, a). metode sejarah, ia menawarkan pendekatan-pendekatan yang terbaik dalam memahami perubahan sosial, b). banyaknya faktor perubahan, c). perbedaan bentuk-bentuk organisasi sosial (nomaden/*badawy*, maupun *ḥaqāry*/menetap), akan menciptakan perbedaan tipe-tipe kepribadian, d). konflik yang berdasarkan *aṣabiyyah* adalah dasar dari mekanisme perubahan, e). perubahan itu cenderung meluas, perubahan akan terjadi pada semua lembaga-lembaga sosial, agama, keluarga, pemerintah, ekonomi¹⁵.

¹⁰ Abdullah, Taufiq & A.C. Van Derr Leden, 1998, "*Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), h. 81

¹¹ *Ibid.*, h. 13-14

¹² Merton, Robert. 1963, "*Social and Social Structure*", (New York: The Free Press), h. 19

¹³ Weber, Max. 1966, "*The Theory of Social and Economic Organization*", (New York: The Free Press), h. 357

¹⁴ Khaldūn, Abd ar-Rahman Ibn., T.tt, "*Muqaddimah*", (Beirut: Dar al-Fikr), h. 41

¹⁵ *Ibid.*, h. 180-181

Dengan cita-cita normatif seperti itu, umat Islam merupakan suatu kelompok yang akan terus-menerus dimotivasi oleh kesadaran kolektifnya dalam membela keadilan sosial-ekonomi dan politik emansipatoris. Tetapi sikap normatif ini hanya akan aktual jika umat dapat melakukan pemihakan kepada mereka yang tertindas, karena proses-proses struktural merampas hak-hak dan peluangnya. Ini berarti umat harus mendefinisikan siapa yang dirugikan itu, di dalam struktur apa mereka dirugikan dan dengan cara bagaimana hal-hal tersebut bisa diatasi¹⁶.

Maka dari itu, transformasi sosial yang terjadi dalam dakwah Kiai sebenarnya adalah sebagai upaya merespon situasi dan kondisi yang berkembang. Transformasi sosial yang dimaksud adalah penciptaan hubungan ekonomi, politik, kultural, dan lingkungan yang mendasar dan lebih baik¹⁷. Dalam hal ini, transformasi dianggap sebagai salah satu model atau bentuk alternatif tentang perubahan sosial, yang merupakan tujuan utama dari setiap gerakan sosial¹⁸. Dengan kata lain, dakwah transformatif¹⁹ yang dilakukan oleh Kiai merupakan model dakwah, yang tidak hanya mengandalkan dakwah verbal (konvensional) untuk memberikan materi-materi agama kepada masyarakat, yang memposisikan da'i sebagai penyebar pesan-pesan keagamaan, tetapi menginternalisasikan pesan-pesan keagamaan ke dalam kehidupan riil masyarakat dengan cara melakukan pendampingan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, dakwah tidak hanya untuk memperkokoh aspek religiusitas masyarakat, melainkan juga memperkokoh basis sosial untuk mewujudkan transformasi sosial. Dengan dakwah transformatif, da'i diharapkan memiliki fungsi ganda, yakni melakukan aktivitas penyebaran materi keagamaan dan melakukan pendampingan masyarakat untuk isu-isu korupsi, lingkungan hidup, hak-hak perempuan, konflik antar-agama dan problem kemanusiaan lainnya²⁰.

Salah satu tokoh Kiai yang sudah masyhur telah berkontribusi dalam melakukan perubahan²¹ ke arah yang positif adalah KH. Abdurrahman Wahid, atau yang biasa dikenal dengan Gus Dur. Salah satu contoh dakwah transformatif KH. Abdurrahman Wahid adalah dobrakannya terhadap pola pikir di lingkungan Nahdlatul Ulama, pesantren, kampus dan LSM. Demikian juga, pencerahan dan

¹⁶ Kuntowijoyo, 1991, "Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi", h. 40-41

¹⁷ Winardi, 2006, "Manajemen Perubahan (The Management of Change)", (Jakarta: Kencana Prenada Group), h. 3. Buku ini menjelaskan bahwa tidak semua perubahan yang akan terjadi akan menimbulkan kondisi yang lebih baik, sehingga dalam hal tertentu perlu diupayakan agar bila dimungkinkan perubahan diarahkan ke arah hal yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya.

¹⁸ Ogburn, William F. 1950, "Social Change", (New York: Viking), h. 24

¹⁹ Dakwah transformatif bisa dilihat dari kandungan ayat al-Qur'an berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُهُ تُحْشَرُونَ ٢٤
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَهِ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١٦٤
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُونًا عِنْدَهُمْ فِي الْوَارِدِ الْأَنْبَجِلِ بِأَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجَلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٥٧

Berdasarkan ayat-ayat ini, dakwah transformatif dapat dilihat dari lima dimensi: Dimensi Tilawah; membacakan ayat-ayat Allah atau Oral Communication, komunikasi langsung dengan public. Dimensi tazkiyah; yaitu sugesti untuk melembagakan kebenaran dan keadilan sosial (amar ma'ruf) dan mendistorsi kejahatan dan kesenjangan sosial (nahi munkar). Dimensi ta'lim; mentransformasi

pengetahuan kognitif kepada masyarakat, sehingga tercipta masyarakat yang berpendidikan (educated people). Dimensi Iqlah; upaya untuk perbaikan dan pembaharuan dalam konteks keberagaman yang lebih luas. Dimensi Ihya' (transformasi, pemberdayaan); upaya dakwah bukan hanya sebatas komunikasi verbal tapi ada wujud transformasi sosial dan pemberdayaan kepada arah kemandirian masyarakat. Dari lima formasi dakwah ini diharapkan dapat membawa pencerahan yang memiliki semangat transformatif dan dapat dijadikan landasan untuk mewujudkan trilogi dakwah; pembentukan, restorasi dan pemeliharaan dan perubahan masyarakat islami.

²⁰ Hamidi, Musthafa., et.al, 2006, "Dakwah Transformatif", (Jakarta: Lakpesdam NU), h. 4

²¹ Masyarakat yang dalam proses pembangunan atau modernisasi, akan banyak mengalami perubahan dan pembaharuan bahkan adakalanya mengalami pergeseran-pergeseran. Perubahan-perubahan tersebut ada yang menyangkut struktur dan organisasi masyarakat, dan lembaga-lembaganya, adakalanya perubahan-perubahan itu menyangkut norma, nilai dan pandangan serta perilakunya. Perubahan pertama disebut transformasi struktural, sedangkan perubahan jenis kedua disebut dengan transformasi kultural. Lihat: Abdullah, Irwan., 2003, "Tantangan Pembangunan Ekonomi dan Transformasi Sosial: Suatu Pendekatan Budaya", Jurnal Humaniora, Volume XIV, No. 3, h.

paparannya dalam berbagai forum seminar maupun ceramah yang diselenggarakan di berbagai tempat dengan beragam tema pembahasan. Untuk melakukan perubahan yang positif di Indonesia, menurut KH. Abdurrahman Wahid, harus dimulai dengan menata sistem pendidikan formal yang selama ini berjalan di Indonesia dengan pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*). Perubahan orientasi ini dimungkinkan karena dalam penilaiannya pola pendidikan formal yang selama ini berjalan kurang memiliki etika dan memberikan penekanan pada aspek moralitas.

Berangkat dari ulasan di atas, tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan bagaimana dakwah transformasi sosial KH. Abdurrahman Wahid di Indonesia?

2. Metode Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, dapat dikatakan bahwa metode penelitian ini adalah *kualitatif* dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*)²². Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, sehingga dalam hal ini penulis tidak hanya mendeskripsikan dakwah KH. Abdurrahman Wahid saja, melainkan juga melakukan analisis terhadap informasi dan data yang terkait dengan dakwah transformasi sosial KH. Abdurrahman Wahid di Indonesia. Dan mengingat objek penelitian ini adalah penelitian ilmu dakwah dan sosial-budaya, maka diperlukan pendekatan-pendekatan:

Pertama, pendekatan sosiologi. Sosiologi menyelidiki persoalan-persoalan umum dalam masyarakat dengan maksud untuk menemukan dan menafsirkan kenyataan-kenyataan kehidupan kemasyarakatan. Sosiologi, khususnya sosiologi agama berusaha untuk memahami kekuatan-kekuatan dasar yang berada di belakang tata kelakuan sosial²³. Masalah sosial merupakan akibat dari interaksi sosial antar individu, antara individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Interaksi sosial berkisar pada ukuran nilai adat-istiadat, tradisi dan ideologi yang ditandai dengan proses sosial yang disosialisir. Sosiologi agama merupakan suatu ilmu yang menelaah dan menganalisis kehidupan bersama manusia serta akibat-akibatnya yang mungkin dilanjutkan dengan suatu proyeksi. Agama sebagai suatu lingkup sosiologi berintikan pada ideologi, doktrin, konsep dan aplikasi, sehingga sudah sewajarnya apabila tumbuh pengkhususan dalam wujud sosiologi agama²⁴.

Kedua, pendekatan sosiologi komunikasi. Kajian ini berhubungan dengan ilmu komunikasi di mana ilmu komunikasi berupaya memahami produksi, pemrosesan dan pengaruh dari sistem-sistem tanda dan lambang melalui pengembangan teori-teori yang dapat diuji²⁵. Lebih lanjut, Stephen W. Littlejohn menerangkan bahwa komunikasi adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang memiliki ciri-ciri; berkenaan dengan pemahaman bagaimana orang berperilaku dalam menciptakan, menukarkan, serta menginterpretasi pesan-pesan²⁶. Ranah sosiologi komunikasi berbeda dengan studi-studi komunikasi dan sosiologi secara keseluruhan, dengan kata lain objek sosiologi komunikasi tidak sama dengan sosiologi secara umum, begitu juga sosiologi komunikasi tidak mengambil objek komunikasi secara utuh, akan tetapi sosiologi komunikasi menjembatani studi-studi sosiologi dan studi-studi komunikasi di mana jembatan yang dibangun berdasarkan kajian sosiologi tentang

²² Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca fenomena transformasi sosial yang terjadi pada saat subjek penelitian masih hidup serta mempelajari buku-buku dengan mengutip dari berbagai teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Lihat: Moleong, Lexy J. 2000, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Rosyad karya), h. 112

²³ Poloma, Margaret M. 2000, "*Sosiologi Kontemporer*", terj. Yasogama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 1

²⁴ Turner, Brayan S. 2003, "*Agama dan Teori Sosial*", (Yogyakarta: IRCi SoD), h. 31

²⁵ Littlejohn, Stephen W. & Karen A. Foss, 2005, "*Theories of Human Communication*", (Belmonts: Thomson Wadsworth), h. 32

²⁶ *Ibid.*, h. 33

interaksi sosial, yang dalam sosiologi juga dikenal dengan subkajian masalah-masalah komunikasi, kemudian menariknya ke dalam studi komunikasi²⁷.

Ketiga, pendekatan antropologi agama. Berbicara tentang transformasi sosial yang dilakukan oleh KH. Abdurrahman Wahid, tidak terlepas dari kajian antropologi khususnya antropologi budaya, yang secara khusus berbicara mengenai budaya lokal, baik yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan inilah yang akan ditransformasikan menuju budaya yang lebih baik menurut kajian Islam, maupun yang ada relevansinya dengan ajaran Islam²⁸.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pendekatan Dakwah Transformatif KH. Abdurrahman Wahid

Pendekatan dakwah merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap dakwah²⁹. Pada umumnya, penentuan pendekatan dakwah didasarkan pada mitra dakwah dan suasana yang melingupinya. Dalam bahasa lain, pendekatan dakwah harus tertumpu pada pandangan human oriented, dengan menempatkan pandangan yang mulia atas diri manusia sebagai mitra dakwah³⁰. Sjahudi Siradj sebagaimana dikutip Ali Aziz mengemukakan tiga pendekatan dakwah, yaitu pendekatan budaya dan bahasa, pendekatan pendidikan, dan pendekatan psikologis³¹.

Pendekatan budaya dan bahasa dalam dakwah adalah penggunaan budaya dan bahasa sebagai alat atau media untuk menyampaikan pesan dakwah, misalnya penggunaan wayang kulit dan bahasa Jawa untuk dakwah pada komunitas suku Jawa, penggunaan bahasa Betawi dan lenong untuk komunitas suku Betawi, dan seterusnya. Pendekatan pendidikan adalah penggunaan pendidikan (*ta'lim*) sebagai sarana untuk mencerdaskan, mencerahkan masyarakat dari kebodohan dalam bidang ilmu agama dan pengetahuan lainnya. Sarananya bisa melalui pesantren, mimbar jum'at, majelis ta'lim, penataran, pelatihan, pendidikan formal dan non formal. Sedangkan pendekatan psikologis adalah pendekatan dakwah dengan sentuhan psikologis kepada mad'u melalui bimbingan konseling, kunsultasi dalam urusan keluarga, agama, dan lainnya.

Pendekatan terhadap mitra dakwah lainnya yang bisa digunakan adalah pendekatan sosial kemasyarakatan. Pendekatan ini meliputi pendekatan sosial politik, pendekatan sosial budaya, dan pendekatan sosial ekonomi. Pendekatan dakwah di atas bisa disederhanakan menjadi dua pendekatan, yakni pendekatan struktural dan pendekatan kultural³². Pendekatan struktural adalah pendekatan dengan menggunakan kekuasaan atau politik. Artinya, untuk memperjuangkan tegaknya keadilan, kemakmuran, pemerataan, dan sistem kehidupan yang lebih baik, dibutuhkan orang-orang yang duduk di lembaga legeslatif untuk membuat undang-undang. Selanjutnya untuk melaksanakan undang-undang diperlukan orang-orang yang duduk di lembaga pemerintahan (eksekutif) seperti menjadi presiden, menteri, gubernur, walikota, bupati, camat dan seterusnya. Jika jajaran pelaksana pemerintahan ini dipegang orang yang jujur, amanah, dan adil, maka kesejahteraan akan dirasakan oleh masyarakat. Sebaliknya, jika kekuasaan dipegang orang yang tidak amanah dan tidak jujur, maka yang terjadi adalah kerusakan dan kehancuran. Sedangkan pendekatan kultural adalah pendekatan non politis; dalam hal ini bisa melalui jalur pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia

²⁷ Bungin, Burhan. 2006, "*Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*", (Jakarta: Kencana), h. 36

²⁸ Connolly, Peter (Ed), 2002, "*Aneka Pendekatan Studi Agama*", Terj. Imam Khoiri, (Yogyakarta: LKiS), h. 13

²⁹ Aziz, Muhammad Ali. 2009, "*Ilmu Dakwah*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 347

³⁰ Tasmara, Toto. 1997, "*Komunikasi Dakwah*", (Jakarta: Gaya Media Pratama), h. 43-44

³¹ Aziz, Muhammad Ali, 2009, "*Ilmu Dakwah*", h. 347

³² *Ibid.*, h. 348

yang berkualitas, mengembangkan kebudayaan yang bernilai tinggi, memberdayakan ekonomi, melatih ketrampilan dan keahlian (*life skill*), dan menegakkan HAM dan demokrasi.

Dari pemaparan di atas, KH. Abdurrahman Wahid menggunakan dua pendekatan secara bersamaan, yakni pendekatan struktural dan kultural dalam dakwahnya. Pendekatan struktural dia gunakan sewaktu menjadi presiden selama 19 bulan. Selama menjadi presiden banyak kebijakan dibuat untuk melindungi dan menghargai eksistensi kelompok minoritas seperti Komunitas Tionghua dan mengakui Konghucu menjadi agama resmi yang diakui oleh negara. Sedangkan pendekatan kultural dia gunakan ketika menjadi guru, aktivis organisasi, dan memimpin PBNU. Dalam dunia pendidikan pada tahun 1960-an, ia pernah menjadi tenaga pengajar di pesantren Tambak Beras milik kakeknya yang salah satu muridnya adalah Sinta Nuriyah yang kelak menjadi istrinya. Tahun 1970 Wahid didaulat menjadi Dekan Fakultas Ushuluddin, Universitas Hasyim Asy'ari Jombang hingga 1974. Masih dalam bidang pendidikan, kiai juga pernah menjadi konsultan di Lembaga Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)³³.

Di bidang budaya tahun 1983, KH. Abdurrahman Wahid pernah menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Pada tahun 1986 dia terpilih menjadi ketua Festival Film Indonesia, dan anggota Dewan Pers Nasional. Dalam bidang ekonomi, ketika dia menjadi ketua umum PBNU dia membuat kerja sama dengan Bank Summa untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR NU-SUMMA) di daerah-daerah. Di bidang politik Wahid pernah duduk sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan puncak kariernya ketika pada 20 Oktober 1999 terpilih menjadi Presiden RI ke-4.

Secara spesifik, KH. Abdurrahman Wahid mampu menggunakan pendekatan struktural dan pendekatan kultural dalam aktivitas dakwahnya. Hal ini yang membedakan dengan para da'i pada umumnya, yang hanya bisa menggunakan pendekatan salah satu seperti kultural saja. Misalnya KH. Anwar Zahid, Yusuf Mansur, dll. Dengan demikian, maka KH. Abdurrahman Wahid adalah seorang da'i yang multi talenta, memiliki dua pendekatan (struktural dan kultural). Namun demikian dari sekian banyak kegiatan dakwahnya, pendekatan kultural lebih banyak dilakukan dibanding dengan dakwah strukturalnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sejak muda sampai usia 60-an tahun, Wahid lebih banyak melakukan dakwah melalui NU, dan mendorong lahirnya berbagai organisasi-organisasi non Pemerintah (ORNOP). Adapun Ornop-ornop yang lahir pada dekade 80-an sampai 90-an di antaranya Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lapesdam).

Menurut Barton, pada tahun 1990-an, kalangan muda NU mendirikan Ornop lebih banyak lagi di kota-kota di Jawa, seperti eLSAD di Surabaya. Dalam beberapa hal KH. Abdurrahman Wahid banyak terlibat secara langsung dalam sejumlah Ornop ini³⁴. Di samping aktif di lingkungan NU, KH. Abdurrahman Wahid juga membentuk Forum Demokrasi (FORDEM) bersama kawan-kawannya yang bersifat lintas agama dan budaya dengan tujuan untuk mendorong tumbuhnya budaya demokratis, masyarakat yang taat hukum dan dihormatinya hak-hak kultural masyarakat.

Hal lain yang membedakan KH. Abdurrahman Wahid dengan para da'i lainnya, adalah bahwa Wahid merupakan sosok pembela bagi mereka orang-orang terancam maupun tertindas dalam seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial,

³³ Mujamil Qomar, 2002, *“NU Liberal: Dari Tradisionalisme Ahlusunah Ke Universalisme Islam”*, (Bandung: Mizan), h. 160

³⁴ Barton, Greg, 2010, *“Biografi Gus Dur”*. terj. Lie Hua, (Yogyakarta: LkiS), h. 192-193

budaya dan agama. Bentuk pembelaan itu bisa melalui esai-esai tulisan, ucapan sampai kepada aksi nyata dalam bentuk tindakan. Wahid juga tidak pandang bulu, tidak membedakan agama, etnis, warna kulit, posisi sosial. Wahid juga tidak ragu untuk mengorbankan image sendiri sebagai kiai berdarah biru, politisi senior, intelektual terkemuka, untuk membela korban yang perlu dibela. Diapun tidak surut karena dikritik, dihujat, dengan berbagai tuduhan negatif seperti ketua ketoprak, neo-PKI, dibaptis masuk Kristen, agen Zionis Yahudi dan sebagainya. Tidak ada beban bagi dirinya ketika harus membela ketidakadilan³⁵. Hal-hal seperti itulah yang membedakan Wahid dengan para da'i, mubalig maupun ustad-ustad yang lain di Indonesia.

b. Metode Dakwah Transformatif KH. Abdurrahman Wahid

Dalam pelaksanaan dakwah, metode merupakan unsur penting yang ikut menentukan sukses tidaknya kerja dakwah. Pemakaian metode yang salah bisa menimbulkan kesahpahaman dan menjauhkan audien dari tujuan dakwah. Penggunaan metode yang sesuai dengan tingkat pemikiran dan kondisi masyarakat atau jamaah akan membantu memudahkan dalam proses dakwah.

Secara garis besar, metode dakwah ada tiga macam, yakni: dakwah secara lisan (*da'wah bi al-lisān*), dakwah tertulis (*da'wah bi al-qalam*), dan dakwah dengan perbuatan atau tindakan (*da'wah bi al-ḥāl*). Berdasarkan tiga metode dakwah tersebut, maka metode dakwah bisa dijabarkan ke dalam metode-metode: (1) ceramah, (2) diskusi, (3) konseling, (4) karya tulis, (5) pemberdayaan masyarakat, dan (6) metode kelembagaan.³⁶

Dalam aktivitas dakwah yang dilakukan oleh KH. Abdurrahman Wahid, metode dakwah yang digunakan meliputi metode-metode sebagaimana yang diuraikan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa KH. Abdurrahman Wahid merupakan seorang da'i atau pendakwah yang telah menggunakan berbagai metode (*multiple methode*) untuk mendakwahkan Islam yang menjadi rahmat bagi alam semesta.

Ungkapan ini didasarkan pada kenyataan bahwa KH. Abdurrahman Wahid selain aktif berceramah di berbagai even dan kesempatan, terutama ketika menjadi Ketua Umum PBNU yang setiap saat berkeliling ke daerah untuk memberikan tausiyah/nasehat, wejangan kepada pengurus atau jamaah Nahdliyin. Dia juga dikenal aktif menjadi penulis yang produktif yang karya-karya tulisnya sering menghiasi media tulis pada era 1980-an. Adapun karya-karya intelektual KH. Abdurrahman Wahid yang telah dibuat buku diantaranya: *Bunga Rampai Pesantren* (1970), *Muslim di Tengah Pergumulan* (1981), *Kiai Nyentrik Membela Pemerintah* (1997), *Islam Tanpa Kekerasan* (1998), *Islamku Islam Anda Islam Kita* (2006). Karya lain berupa terjemah, salah satunya: *Cinta dan fakta* karya Husain Naser. Dia juga banyak menulis kata pengantar pada buku seperti: *Nahdlatul Ulama' Traditional and Modernity in Indonesia* karya Greg Barton dan Greag Fealy. *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat* karya Martin Van Bruinessen, *Telaah Kritis Atas Pemikiran Hasan Hanafi* karya Kazuo Shimogaki, dan buku *Nahdlatul Ulama dan Pancasila* karya Einar M. Sitompul³⁷.

Di samping itu, KH. Abdurrahman Wahid sering menjadi narasumber pada berbagai seminar dan diskusi, baik di dalam maupun di luar negeri. Pendapat-pendapatnya pun banyak dikutip dan diabadikan para penulis, baik dari kalangan muda NU, maupun pihak lain yang tertarik dengan pemikiran-pemikiran yang otentik dan kreatif atas berbagai isu atau persoalan.

³⁵ Wahid, Abdurrahman, 2010, "*Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*", (Jakarta: The Wahid Institute), h. v

³⁶ Aziz, Muhammad Ali, 2009, "*Ilmu Dakwah*", h. 382

³⁷ Qomar, Mujamil, 2002, "*NU Liberal:...*", h. 167-168

Dalam hal pemberdayaan masyarakat, apa yang dilakukan KH. Abdurrahman Wahid bersama anak-anak muda NU dengan mendirikan lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAPESDAM), Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), dan eLSAD merupakan kerja nyata Kiai. Dia mendorong dan memantau secara aktif lahirnya lembaga-lembaga tersebut, sebagai wadah pemberdayaan anak-anak muda NU. Di luar itu bersama-sama masyarakat lintas agama, KH. Abdurrahman Wahid juga terlibat dalam pendirian lembaga-lembaga atau organisasi perjuangan untuk tegaknya demokrasi seperti Forum Demokrasi (FORDEM) dan lain-lain. Dalam bidang politik, KH. Abdurrahman Wahid juga merupakan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan wadah aspirasi politik warga Nahdliyin dan masyarakat umum.

Dari sisi dakwah kelembagaan, KH. Abdurrahman Wahid telah mengabdikan dirinya di Lembaga Pesantren Tambak Beras selama tiga tahun (1960-1963), menjadi Dekan di Universitas Hasyim Asy'ary (1970). Dan menjadi ketua umum PBNU selama tiga periode (1984-1989), periode (1989-1995), dan periode (1995-2000)³⁸.

Metode dakwah lain yang digunakan KH. Abdurrahman Wahid adalah metode seni budaya. Kecintaan dan kegemaran Kiai sejak muda adalah menonton wayang kulit, film dan membaca buku-buku cerita novel dan sastra mengilhami untuk dakwah dengan membentuk grup musik yang dinamai Kiai Ganjur, bersama seniman-seniman muda NU seperti al-Jastro Ngatawi. Dalam grup Ki Ageng Ganjur, KH. Abdurrahman Wahid didaulat sebagai pengisi orasi dan nasehat-nasehat agama dan nasehat kehidupan di sela-sela bunyi gamelan. Metode dakwah seperti ini pernah dipraktekkan oleh para wali sembilan (Wali Songo) dalam mengajarkan Islam di tengah masyarakat Jawa. Rupanya KH. Abdurrahman Wahid ingin melanjutkan tradisi metode dakwah para wali tersebut dalam berdakwah.

c. Dakwah Transformasi Sosial KH. Abdurrahman Wahid

Melalui berbagai tulisan, pernyataan dan sikap KH. Abdurrahman Wahid yang bisa ditemukan pada berbagai sumber, bisa dijelaskan tentang bagaimana bentuk dakwah transformatif dilakukan. Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam menurut KH. Abdurrahman Wahid harus diajarkan kepada masyarakat melalui cara-cara yang damai, santun humanis. Untuk itu aktivitas dakwah transformatif harus dilakukan melalui program aksi untuk menjamin keselamatan fisik warga negara secara individual (*hifz an-nafs*), hak warga untuk melindungi keluarga dan keturunan mereka (*hifz an-nasl*), keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama (*hifz ad-din*), keselamatan harta benda dan milik pribadi dari gangguan atau penggusuran diluar prosedur hukum (*hifz al-mal*), dan keselamatan hak milik dan profesi (*hifz al-aql*).³⁹ Implementasi jaminan ini harus dapat mendukung lahirnya kesejahteraan material dan spiritual masyarakat. Lebih lanjut KH. Abdurrahman Wahid berpendapat, bahwa untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual dibutuhkan beberapa perubahan sosial yang signifikan. Beberapa transformasi sosial yang dilakukan oleh KH. Abdurrahman Wahid di Indonesia, yang bisa dijadikan model dakwah transformatif, meliputi:

³⁸ *Ibid.*, h. 167

³⁹ Wahid, Abdurrahman, 1998, "Islam, Anti-Kekerasan, dan Transformasi Nasional", dalam Glenn D. Paige, Chaiwat Satha Anand, dan Sarah Gilliatt (eds.) *Islam Tanpa Kekerasan*, terj. M. Taufiq (Yogyakarta: LKiS), h. 74

Pertama, perubahan aspek materi dakwah, yaitu dari materi *'ubudiyah* atau *ukhrāwiyah* ke materi dakwah yang bersifat sosial. Dalam konteks ini, da'i dituntut untuk memperluas masalah isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat dan menjadi patologis sosial seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penindasan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan lain-lain⁴⁰. *Kedua*, perubahan dari materi dakwah eksklusif ke materi dakwah inklusif, di mana da'i dituntut untuk menghilangkan sifat memojokkan atau memusuhi nonmuslim, karena kecenderungan selama ini, da'i sering menyampaikan dakwah yang bernada permusuhan dengan agama lain⁴¹. Aktualisasi sistem dakwah ketika dakwah Islam dicanangkan dalam masyarakat yang belum Islam, pesan Islam oleh masyarakat setempat dipandang asing/pendatang. Penerimaan terhadap pesan dakwah dibarengi dengan sikap kritis berupa penilaian; apakah Islam sejalan dengan apa yang telah dimiliki atau bertentangan secara diametral. Di sini dakwah dihadapkan dengan pilihan yang kadangkala dapat mengaburkan pesan itu sendiri⁴².

Ketiga, aspek metodologi; perubahan dakwah dari monolog ke dialog. Dakwah dengan monolog sering terjadi indoktrinasi kepada jama'ah, padahal Islam juga menganjurkan dialog yang mampu memberikan pencerahan dengan komunikasi langsung dengan jama'ah sehingga da'i tahu masalah umat yang sebenarnya. Dakwah dengan pendekatan dialog akan memancing keaktifan jama'ah untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial yang berdimensi religius. Jika hanya mengandalkan pendekatan monolog, maka dakwah hanya mampu menghilangkan dahaga spiritual, bukan melakukan perubahan pemahaman, sikap dan perilaku sosial⁴³.

Keempat, institusi merupakan indikator penting untuk memuluskan jalan perubahan. Dalam dakwah transformatif, KH. Abdurrahman Wahid menggunakan institusi seperti institusi politik dan institusi pendidikan seperti pesantren, yang bisa diajak bersama dalam aksi. Kekuatan dakwah transformatif bukan saja pada diri sang da'i, tetapi juga basis institusional yang dimilikinya, sehingga para da'i mempunyai *bargaining position* (posisi tawar) yang tinggi terhadap negara dan masyarakat⁴⁴.

Kelima, ada wujud keberpihakan pada kaum *mustad'afin* (kaum minoritas). Para da'i, harus melakukan usaha-usaha sosial untuk kepentingan kaum minoritas di daerahnya, seperti kasus etnis Tionghoa yang hak-haknya ditekan oleh pemerintahan orde baru dan kasus lainnya. *Keenam*, KH. Abdurrahman Wahid juga melakukan pembimbingan dan pendampingan bahkan melakukan advokasi dan pengorganisasian masyarakat terhadap kasus-kasus dan problematika sosial masyarakat⁴⁵.

Secara keseluruhan, keenam transformasi sosial yang dilakukan KH. Abdurrahman Wahid di atas secara tidak langsung menampilkan universalitas pandangan hidup yang utuh dan bulat. Untuk mencapainya, pemerintah harus tegas dan konsisten untuk menjalankan pemerintahan ini berdasarkan prinsip hukum

⁴⁰ Lihat: Al-Bayānūnī, Muhammad 'Abd al-Faṭḥ, 1991, "*al-Madkhal ila 'Ilmi al-Da'wah*", (Beirut: Muassasah al-Risālah), h. 120. Tentang syarat utama da'i profesional adalah kemampuannya mengolah materi dakwah yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Da'i sebagai agen perubahan sosial tidak akan terwujud jika kemampuan dalam penguasaan materi tidak memadai, akibatnya dakwah tidak menghasilkan perubahan apa-apa.

⁴¹ Hamdi, Mustafa (ed), 2006, "*Dakwah Transformatif*", (Jakarta: Lakpesdam NU), h. 11

⁴² Ahmad, Amrullah (ed), 1983, "*Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*", (Yogyakarta: Prima Duta), h. 16

⁴³ Hamdi, Mustafa (ed), 2006, "*Dakwah Transformatif*", h. 12

⁴⁴ Titik tekannya dalam konsep ini adalah Institusi sosial sebagai saluran perubahan sosial. Lebih lengkapnya baca: Hendropuspito OC, 1998, "*Sosiologi Sistematis*", (Yogyakarta: UGM Press), h. 127

⁴⁵ Dalam konteks ini, Hasan al-Banna mengilustrasikan bahwa seorang da'i ibarat gardu listrik yang menyebarkan aliran listrik untuk menerangi seluruh pelesok dan sudut kota. Oleh sebab itu tugas dan tanggung jawab da'i adalah menyampaikan sinar dan cahaya Islam tersebut ke segenap lapisan masyarakat. Lihat: Kasman, Suf, 2004, "*Jurnalisme Universal: Menelusuri Prinsip-prinsip Dakwah bi al-Qalam dalam Al-Qur'an*", (Jakarta: Teraju), h. 127

yang berkeadilan, persamaan derajat, dan sikap tenggangrasa terhadap perbedaan pandangan yang ada. Dari sisi dakwahnya, yang tidak kalah penting adalah bagaimana ada keikutsertaan lembaga-lembaga dakwah atau lembaga non pemerintah (LSM) yang bekerja secara bebas tanpa terikat oleh pemerintah dan pihak manapun untuk mendorong pemerintah sekaligus menjadi pengkritik atas berbagai penyimpangan yang terjadi di masyarakat guna tercapainya lima dasar jaminan kehidupan di atas.

Sebagai manifestasi atas universalisme Islam yang utuh tersebut, dakwah transformasi sosial KH. Abdurrahman Wahid di atas dapat dicontohkan dalam beberapa sikap dan tindakannya, antara lain kegigihannya dalam membela kaum minoritas seperti membela Ahmadiyah, Syiah, Kristen, Inul Daratista, dan lain-lain. Ketika ada kelompok minoritas diperlakukan tidak adil, maka KH. Abdurrahman Wahid tampil melakukan pembelaan. Pembelaannya pada kelompok minoritas tersebut bukan membela keyakinan atau ideologi mereka, tetapi KH. Abdurrahman Wahid ingin kebebasan warga negara untuk beragama dan berkeyakinan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 benar-benar dihormati. Karena menghormati perbedaan bagi KH. Abdurrahman Wahid sama dengan menjaga universalisme Islam itu sendiri.

Sikap keberagaman yang transformatif dan universal juga dibuktikan dengan pengakuan KH. Abdurrahman Wahid terhadap keberadaan agama Konghucu sebagai agama dan keyakinan yang sah hidup di Indonesia. Menurut Hermawan Sulisty, kebijakan transformatif KH. Abdurrahman Wahid ketika ia menjadi Presiden yang mengesankan adalah memperkuat civil society masyarakat Madani dengan membuka ruang publik yang seluas-luasnya bagi ekspresi kebebasan pers. KH. Abdurrahman Wahid secara ofensif membuka ruang pluralisme secara terbuka, dan menetapkan Konghucu sebagai agama resmi⁴⁶. Kemudian untuk menghormati komunitas suku Tionghua, KH. Abdurrahman Wahid menetapkan Hari Besar Imlek sebagai hari libur nasional, dan memberikan kebebasan untuk menggelar kebudayaan dan kesenian mereka, tentu saja kebijakan ini disambut hangat oleh warga etnis keturunan Tionghoa yang sejak lama sudah sangat dinantikan⁴⁷.

Selain itu, dakwah transformasi sosial KH. Abdurrahman Wahid di atas juga dapat dicontohkan dalam tindakan modernisasi pesantren. Menurut KH. Abdurrahman Wahid, pesantren sudah tidak saatnya lagi hanya mempertahankan kajian rutin atas kitab kuning, namun harus mampu menggunakannya sebagai sumber inspiratif untuk modernisasi, transformasi dan menjadikannya sebagai pangkalan untuk mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM). Hal ini dilakukan untuk mewujudkan integrasi organik antara nilai-nilai lama dan visi budaya yang baru dengan mengedepankan rasionalitas untuk memunculkan kreativitas dari tradisi. Keberadaan LSM atau LPSM yang berangkat dari pesantren akan bermuara pada terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai religius yang humanis⁴⁸.

Dalam penilaian KH. Abdurrahman Wahid beberapa buku-buku (kitab) materi pendukung pembelajaran di pesantren sudah kurang relevan dan peka terhadap proses untuk menyejahterakan masyarakat. Beberapa buku tersebut telah kehilangan watak berkembangnya, disebabkan karena buku-buku yang diajarkan hanya berupa pengulangan materi dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, karenanya buku-buku itu harus direkonstruksi. Hanya saja, yang diperlukan dalam

⁴⁶ Choirie, Effendy, Arief Mudatsir, dan Hermawan Sulisty (ed.), 2010, *"Sejuta Gelar untuk Gus Dur"*, (Jakarta: Pencil 324; PB IKA-PMII), h. xii

⁴⁷ *Ibid.*, h. xii

⁴⁸ Wahid, Abdurrahman, 2010, *"Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren"*, (Yogyakarta: LKiS), h. 60

rekonstruksi bahan ajar di pesantren harus menekankan pada aspek-aspek tradisional yang selama ini berjalan, agar tradisionalisme yang telah mengakar di kalangan pesantren dapat menunjukkan elan vitalnya yang matang dan transformatif.

Selain itu, rekonseptualisasi metode pengajaran, menurut KH. Abdurrahman Wahid, harus dilakukan dengan menyampaikan materi yang berbasis pada kenyataan (kontekstual) dan lebih menekankan pada pemberian contoh yang baik (*uswatun hasanah*) dari pendidik serta penekanan pada "kultur kritik"⁴⁹. Metode ini sudah sejak awal diperkenalkan oleh peradaban Islam, sebagaimana kritik konstruktif al-Ghazāli (w. 1111) terhadap Ibn Sina (w. 1037) dalam *Tahāfut al-Falāsifah* (Kerancauan Filsafat). Kemudian Ibn Rusyd (w. 1198) mengkritik al-Ghazāli dalam *Tahāfut al-Tahāfut* (Kerancauan [buku] Kerancauan Filsafat)⁵⁰.

Di sisi lain, pendidik seharusnya bersifat penuh cinta, penyabar, penyayang, komunikatif dan demokratis dengan memberikan perdebatan-perdebatan ilmiah. ...Kita sebaiknya (membiasakan) berdebat secara tulus dan jujur dengan cara mengedepankan akal sehat dan hati yang jernih. Perbedaan adalah hal yang wajar dan manusiawi dalam kehidupan ini. Jangan sikapi perbedaan dengan kekerasan... Mari kita wujudkan peradaban di mana manusia saling menyintai, saling mengerti, dan saling menghidupi⁵¹.

Dus, KH. Abdurrahman Wahid sebagai da'i sekaligus *agent of change* telah memberikan dasar filosofi "eksistensi diri" dalam dimensi individual, keluarga, dan sosio-kultural, sehingga dapat memiliki kesiapan untuk berinteraksi dan menafsirkan kenyataan-kenyataan yang dihadapi secara mendasar dan menyeluruh menurut ajaran Islam. Oleh karena perubahan sosial atau transformasi sosial menuju pada arah tertentu, maka dakwah Islam berfungsi memberikan arah dan corak ideal tatanan masyarakat baru yang akan datang. Aktualitas dakwah berarti upaya penataan masyarakat terus-menerus di tengah-tengah dinamika perubahan sosial sehingga tidak ada satu sudut kehidupan pun yang lepas dari perhatian dan penggarapannya. Dengan demikian dakwah Islam senantiasa harus bergumul dengan kenyataan baru yang pemunculannya kadangkala sulit diperhitungkan sebelumnya⁵².

(Islam) tidak lagi cukup menjadi ekspresi keimanan sebagai muslim untuk menegakkan ajaran formal Islam belaka, tetapi harus menjadi bagian dari upaya kemanusiaan umum untuk membebaskan rakyat-rakyat yang tertindas dari belenggu kenistaan, kehinaan dan kepapaan yang menurunkan derajatnya sebagai makhluk yang mulia. Untuk itu dituntut gerakan-gerakan perlawanan kultural kaum muslimin untuk terlebih dahulu mampu hidup bersama dengan manusia-manusia dari lain agama, idiologi politik dan pandangan budaya, yang memiliki kesamaan

⁴⁹ Menurut, metode yang jauh dari realitas hanya akan memberikan gambaran hayali yang kurang bersentuhan dengan kenyataan-kenyataan hidup yang ada di masyarakat, dan pengetahuan yang didapat sebatas pada pengetahuan teoritis yang tidak aplikatif. Sementara metode *uswatun hasanah*, lebih aplikatif dan kontekstual. Lihat: Wahid, Abdurrahman 2010, "Menggerakkan...", h. 95-96

⁵⁰ Misrawi, Zuhairi, 2009, "Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah dan Teladan Muhammad SAW", (Jakarta: Penerbit Buku Kompas), h. 50

⁵¹ Dinukil dalam Faqieh, Maman Imanulhaq, 2010, "Fatwa dan Canda Gus Dur", (Jakarta: Penerbit Buku Kompas), h. 115

⁵² Islam sebagai agama yang membebaskan semestinya mampu menjawab problem-problem kemanusiaan, seperti ketidakadilan, penindasan, kesewenang-wenangan dan kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga Islam tidak kehilangan orientasi horizontalnya dalam menjaga hubungan dengan sesama manusia. Belum lagi problem sosial tentang maraknya praktek korupsi yang terjadi di masyarakat dan sistem penyelenggaraan negara (birokrasi). Islam yang hanya memiliki orientasi vertikal merupakan karakter Islam yang eksklusif dan tidak memiliki semangat perubahan. Padahal, sejak dari awal, Islam didakwahkan memiliki orientasi kemanusiaan yang sangat kuat agar terjadi keseimbangan sosial dalam masyarakat. Lihat: Abdurrahman, Moeslim 1997, "Islam Transformatif", (Jakarta: Pustaka Firdaus), h. 10

pandangan dasar tentang hakekat tempat manusia dalam kehidupan dan cara-cara untuk mewujudkannya⁵³.

4. Kesimpulan

Artikel ini membuktikan bahwa perubahan strategi, metode dan orientasi dakwah berkontribusi signifikan terhadap transformasi sosial di kalangan masyarakat. Temuan artikel menunjukkan bahwa transformasi sosial-budaya di dalam komunitas masyarakat Indonesia di antaranya terjadi karena adanya perubahan materi, metode, strategi dan orientasi dakwah KH. Abdurrahman Wahid yang berperan sebagai fungsionaris agama, sebagai katalisator, penghubung sumber, pemberi pemecahan masalah dan mediator. *Wallahu a'lam.*

⁵³ KH. Abdurrahman Wahid, sebagaimana dikutip dalam Arif, Syaiful, 2009, "*Gus Dur dan Ilmu Sosial Transformatif: Sebuah Biografi Intelektual*". (Jakarta: Penerbit Koekoesan), h. 111